

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah “gender” berasal dari wacana feminisme yang muncul pada abad ke-20 dan terus berkembang hingga saat ini (Afandi, 2019). Secara mendasar, gender merujuk pada peran, perilaku, tanggung jawab, dan identitas yang dikonstruksi secara sosial bagi laki-laki dan perempuan. Berbeda dari jenis kelamin yang bersifat biologis, gender menggambarkan bagaimana masyarakat memandang dan menetapkan peran yang dianggap sesuai bagi seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Pemahaman ini penting untuk menganalisis berbagai bentuk ketimpangan yang sering terjadi di masyarakat. Dalam konteks budaya patriarki, pemahaman gender sering kali disalahartikan. Masyarakat kerap kali mengasosiasikan perempuan dengan tanggung jawab domestik seperti mengurus rumah tangga, membesarkan anak, dan melayani suami, sementara laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama keluarga (Dalimoenthe, 2021). Pola pikir ini tidak hanya membatasi ruang gerak perempuan di sektor publik tetapi juga menempatkan laki-laki dalam tekanan untuk selalu menjadi "pemimpin" rumah tangga. Padahal, tanggung jawab domestik maupun ekonomi seharusnya dapat dibagi secara adil, bergantung pada kemampuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

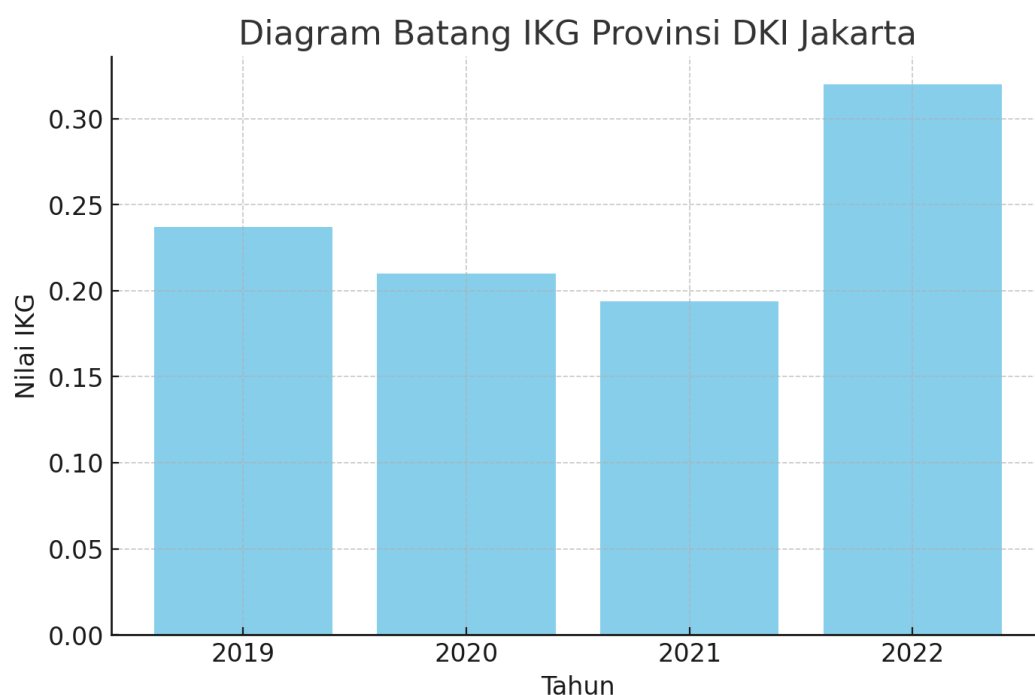
Ketimpangan gender seperti ini membawa dampak serius, tidak hanya bagi perempuan tetapi juga terhadap perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu dampak signifikan adalah dalam bidang ekonomi.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja membatasi produktivitas nasional, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi efisiensi pembangunan (Harahap, 2014). Studi sebelumnya menunjukkan bahwa ketimpangan gender dapat menurunkan kontribusi perempuan terhadap perekonomian akibat terbatasnya akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak (Aktaria & Handoko, 2012). Dengan demikian, memperbaiki ketimpangan gender bukan hanya isu kesetaraan, tetapi juga strategi penting untuk meningkatkan kinerja ekonomi sebuah negara atau wilayah.

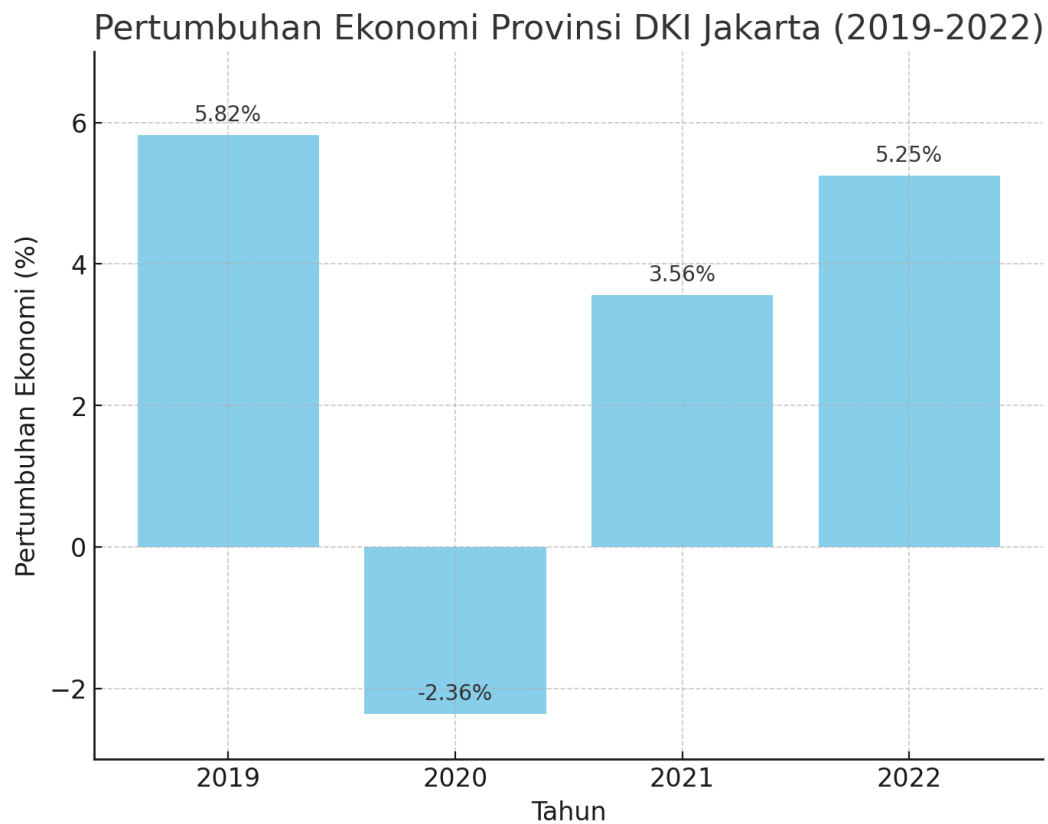
DKI Jakarta, sebagai ibu kota negara dan pusat bisnis utama di Indonesia, memainkan peran strategis dalam perekonomian nasional. Wilayah ini merupakan tonggak utama pertumbuhan ekonomi yang menyumbang lebih dari 17% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Citradi, 2020). Dengan infrastruktur yang lebih maju, akses terhadap modal, serta populasi tenaga kerja yang besar dan beragam, DKI Jakarta menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mendominasi sektor perdagangan, jasa, dan industri. Peran strategis ini menjadikan perkembangan ekonomi DKI Jakarta memiliki dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, memahami dinamika perekonomian di wilayah ini, termasuk hubungan antara ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi, sangatlah penting untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Namun, kondisi yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta menampilkan sebuah anomali yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan data BPS tahun 2020,

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di DKI Jakarta menurun dari 0,237 menjadi 0,210. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender. Akan tetapi, ekonomi justru tumbuh secara negatif sebesar -2,36% setelah sebelumnya berada di angka 5,82% (Bank Indonesia, 2021). Sebaliknya, pada tahun 2022, ketika IKG meningkat dari 0,194 menjadi 0,320 (yang menunjukkan memburuknya ketimpangan gender), pertumbuhan ekonomi justru meningkat dari 3,56% menjadi 5,25% (Badan Pusat Statistik, 2023). Fakta ini memperlihatkan adanya hubungan yang kompleks antara ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi, sehingga penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dinamika tersebut.



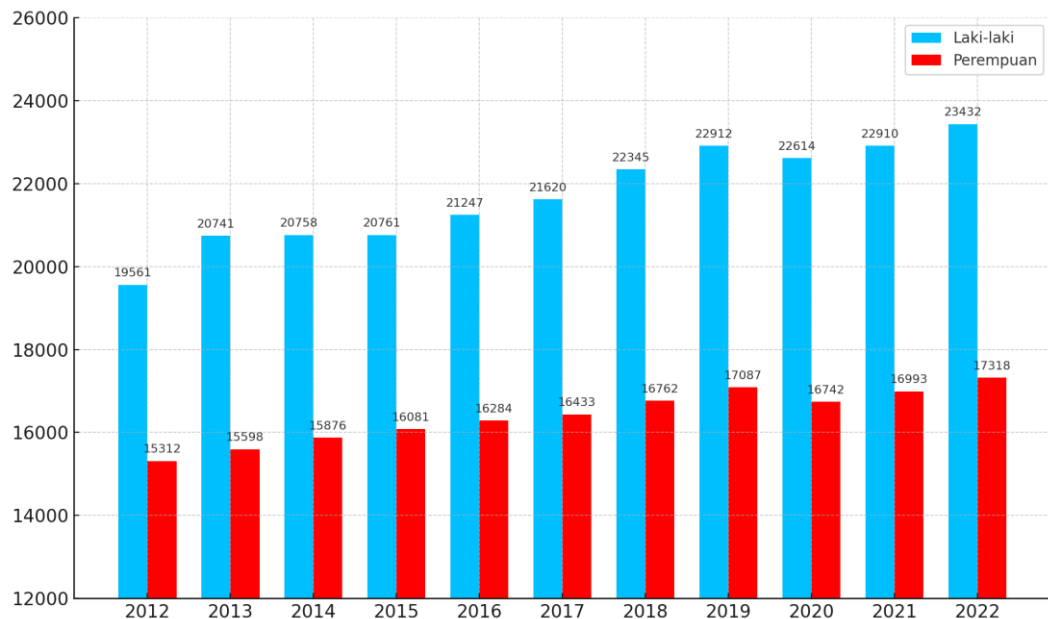
Gambar 1. 1 IKG Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 (Sumber: BPS)



Gambar 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 sampai Tahun 2022 (Sumber: BI & BPS)

Ketimpangan gender tidak hanya menyangkut perbedaan akses terhadap pekerjaan dan pendapatan tetapi juga kualitas hidup secara keseluruhan. Misalnya, perempuan sering menghadapi tantangan dalam memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki, yang pada akhirnya memengaruhi peluang kerja dan kemampuan mereka untuk berkontribusi pada ekonomi (Sonia & Sassi, 2024). Dalam sektor tenaga kerja, perempuan sering kali berada di posisi yang kurang dihargai, dengan upah yang lebih rendah meskipun memiliki tanggung jawab yang sama atau lebih besar dibandingkan laki-laki (Oktaviani et al., 2024).

Di wilayah DKI Jakarta sendiri, kendatipun merupakan wilayah metropolitan dengan gaya hidup modern, ketimpangan gender dalam hal ketenagakerjaan masih terjadi. Laki-laki dianggap memiliki fisik yang lebih kuat, sehingga berpeluang lebih tinggi untuk memperoleh kesempatan kerja dibandingkan perempuan (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023). Meski demikian, perempuan tetap berkesempatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahkan secara kuantitas, jumlah PNS perempuan lebih banyak dibandingkan PNS laki-laki. Namun, untuk jabatan fungsional umum dan struktural masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Putra et al. (2023) yang mengungkapkan adanya budaya organisasi yang mengharuskan laki-laki sebagai pimpinan. Budaya tersebut tentu menghambat perempuan untuk mendapatkan promosi jabatan atau menduduki jabatan-jabatan struktural. Situasi ini memperburuk siklus ketimpangan dan membatasi potensi ekonomi yang seharusnya dapat dicapai melalui kontribusi yang lebih seimbang. Hal tersebut dibuktikan dengan *gap* pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan di Provinsi DKI Jakarta yang cukup besar, yakni kisaran Rp.4.249.000,- hingga Rp.6.114.000,- sepanjang tahun 2012 sampai 2022 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023).



Gambar 1. 3 Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Per Tahun (PPP), 2012-2022 (Ribuan Rupiah) (Sumber: BPS)

Secara global, penelitian telah menunjukkan bahwa kesetaraan gender memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya, Bank Dunia melaporkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja dapat meningkatkan PDB global secara signifikan (Xinhua, 2024). Dalam konteks Indonesia, beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang serupa. Penelitian oleh Pertiwi, Heriberta, dan Hardiani (2021) di Provinsi Jambi, misalnya, menemukan bahwa ketimpangan gender memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, studi oleh Deris, Bhinadi, dan Nuryadin (2022) yang menganalisis 34 provinsi di Indonesia menemukan bahwa peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa

pengurangan ketimpangan gender tidak hanya memperbaiki kehidupan individu tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi masyarakat.

Namun, anomali yang terjadi di DKI Jakarta memperlihatkan bahwa hubungan antara ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu linear. Faktor-faktor lain seperti kondisi makro ekonomi, pandemi COVID-19, dan kebijakan pemerintah juga dapat memengaruhi dinamika ini. Misalnya, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan ekonomi yang signifikan di seluruh dunia, termasuk di DKI Jakarta (Arianto, 2020). Dampaknya lebih besar dirasakan oleh kelompok rentan, termasuk perempuan, yang lebih banyak bekerja di sektor informal dan menghadapi risiko kehilangan pekerjaan yang lebih tinggi (Muhardono et al., 2022). Sementara itu, peningkatan Indeks Ketimpangan Gender pada tahun 2022 yang bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa aspek gender mungkin tidak selalu menjadi faktor utama dalam mendorong atau menghambat pertumbuhan. Faktor-faktor seperti kebijakan fiskal, investasi swasta, atau perbaikan infrastruktur juga dapat berperan besar dalam menentukan tren ekonomi (Lativa, 2021). Dalam hal ini, penelitian yang lebih komprehensif diperlukan untuk mengeksplorasi sejauh mana ketimpangan gender dapat menjadi pemicu atau hambatan pertumbuhan dalam konteks tertentu.

Penelitian ini penting untuk menjawab pertanyaan tentang seberapa besar ketimpangan gender memengaruhi pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta, khususnya dalam konteks anomali yang terjadi pada tahun 2020 dan 2022, dengan

menggunakan data-data sepanjang tahun 2012 sampai 2022. Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih valid dan menggambarkan tren secara menyeluruh, data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup rentang waktu dari tahun 2012 hingga 2022. Rentang waktu ini dipilih agar analisis tidak terbatas hanya pada kondisi terkini, tetapi juga mempertimbangkan dinamika yang terjadi selama satu dekade terakhir. Kendati demikian, tahun 2020 dan 2022 tetap mendapat perhatian khusus karena adanya potensi anomali sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang memengaruhi berbagai aspek sosial dan ekonomi, termasuk ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menyertakan data dari tahun-tahun tersebut, diharapkan analisis dapat mencerminkan pola hubungan yang lebih akurat antara variabel yang diteliti. Melalui pendekatan kuantitatif dengan paradigma positivistik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan kausal antara variabel ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan analisis empiris yang didasarkan pada data yang dapat diukur dan diverifikasi.

Selain kontribusi ilmiah, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis bukti. Kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan di pasar kerja, misalnya, tidak hanya dapat memperbaiki indikator kesetaraan gender tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi hubungan antara ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat mengidentifikasi intervensi yang paling efektif untuk mengurangi ketimpangan

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kesimpulannya, penelitian ini berupaya menjawab tantangan mendasar dalam hubungan antara ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi. Dengan mempertimbangkan dinamika yang unik di DKI Jakarta, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan baru tetapi juga berkontribusi pada perdebatan yang lebih luas tentang peran gender dalam pembangunan ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan meneliti mengenai seberapa besar pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012 sampai 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis pengaruh Ketimpangan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012 hingga 2022;
- 2) Mengukur seberapa besar Ketimpangan Gender dapat memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012 hingga 2022;
- 3) Memberikan rekomendasi berupa data untuk penyusunan kebijakan yang lebih inklusif guna meminimalisasi ketimpangan gender dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

1.4 Batasan Penelitian

1.4.1. Batasan Wilayah

Penelitian ini hanya mencakup wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai objek penelitian utama, dengan mempertimbangkan peran strategisnya dalam perekonomian nasional serta ketersediaan data yang relevan.

1.4.2. Batasan Waktu

Penelitian ini berfokus pada tahun 2012 hingga 2022 untuk menganalisis hubungan antara ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi dalam periode tersebut.

1.4.3. Variabel Penelitian

- 1) Variabel independen berupa ketimpangan gender yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- 2) Variabel dependen berupa pertumbuhan ekonomi yang diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

1.4.4. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengkajian hubungan antara ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti kebijakan fiskal, investasi swasta, atau dampak pandemi COVID-19 secara langsung.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai wawasan tambahan dalam literatur ilmu sosial, khususnya ilmu politik dan ekonomi terkait hubungan antara ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Sebagai rujukan akademik untuk penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa, tentunya dengan latar waktu atau tempat yang berbeda.

1.5.2 Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun kebijakan agar mampu menurunkan tingkat ketimpangan gender dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan;
- 2) Sebagai rujukan untuk menyusun program-program terkait pemberdayaan perempuan yang juga dapat diinisiasi oleh organisasi non-pemerintah.

1.5.3 Manfaat Sosial

- 1) Sebagai bahan materi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa penurunan ketimpangan gender tidak hanya

berdampak pada pemberdayaan perempuan, tetapi juga pertumbuhan ekonomi.